

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebuah perkembangan ekonomis gambaran dari hasil kerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini juga merupakan alat untuk mengukur suatu besaran adalah indikator. baik kesejahteraan penduduk di daerah atau negara meningkat. Pembangunan daerah, yang berhubungan dengan pembangunan nasional, adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pertumbuhan suatu daerah atau negara sehingga mampu menjalankan pemerintahan dengan baik. Pembangunan daerah biasanya didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita yang berkelanjutan sehingga dapat memperbanyak output lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduk. (Supremoko, 1997). Menurut Kuncoro dalam (Teja Rinanda, 2020) Tingkat ekonomi yang berkembang adalah salah satu tujuan yang paling penting baik untuk pemerintah daerah dan pusat. Untuk mendorong peningkatan ekonomi, pemerintah daerah harus melaksanakan pembangunan ekonomi secara efisien, yaitu dengan mengawasi sumber daya yang ada dan mengembangkan hubungan kerja yang solid bersama masyarakat. Tujuan dari kemitraan ini adalah menciptakan tempat kerja baru, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada perkembangan bisnis di daerah tersebut. Selain itu, pembangunan ekonomi dapat diidentifikasi melalui peningkatan produksi dan pendapatan perkapita penduduk, jadi tercapai perubahan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan alokasi sumber daya, dan meningkatkan produktivitas ekonomi, pemerintah dapat membangun infrastruktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, yang umumnya dijadikan indikator kesuksesan pembangunan dan kemajuan ekonomi suatu wilayah, dapat diukur melalui perubahan pada hasil. Untuk mengukur kemajuan perekonomian, diperlukan alat ukur yang tepat, dan salah satu alat ukur yang umum digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Produk Domestik Bruto (PDB) adalah ukuran yang sebanding di tingkat regional (Putra, 2019).

Salah satu ukuran kesuksesan pembangunan ekonomi diukur dari kegiatan perekonomian. Menurut dampak nyata dari pelaksanaan kebijakan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat. Produk regional bruto (PDRB) merupakan metrik yang berguna untuk menilai pertumbuhan ekonomi regional. Seluruh nilai produk dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan di suatu wilayah adalah PDB-nya. (Febrianto and Muchtolifah, 2022). Pengelolaan alokasi PDRB suatu daerah dijalankan secara otonom oleh pemerintah daerah, didasarkan pada kebijakan pemerintah pusat yang diatur melalui Kebijakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Peraturan ini dapat dipandang Inilah peluang dan kesulitan yang dihadapi pemerintah dari dua sudut pandang daerah. Sebab, dalam Undang-Undang tersebut, terdapat amanat kewenangan otonomi, khususnya untuk melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, terutama dalam pengembangan sarana dan prasarana publik. (Teja Rinanda, 2020).

Rahardjo Adisasmita dalam (Pramana, 2022) mengklaim bahwa variabel ekonomi dan non-ekonomi mempunyai dampak pada proses yang mendasari pertumbuhan ekonomi. Modal usaha, teknologi, sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), dan sumber daya lainnya diperlukan untuk kemajuan perekonomian. Selain pertimbangan finansial, pertumbuhan ekonomi juga membutuhkan faktor non ekonomi yang menunjang pertumbuhannya. Diantaranya pengaruh pola budaya, institusi politik, institusi sosial, dan lain-lain. Akibatnya, ekspansi ekonomi suatu daerah diukur berdasarkan mekanisme untuk meningkatkan output perkapita dalam jangka panjang. Proses kenaikan output ini dapat diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDRB) suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari PDRB tahun tersebut yang dibandingkan dengan PDRB tahun sebelumnya (Maimunah, 2013). Pertumbuhan ekonomi setiap tahun menggambarkan perkembangan perekonomian yang terjadi di suatu negara ataupun daerah. Perkembangan perekonomian akan terlihat dari peningkatan produksi suatu barang maupun jasa. Peningkatan produksi barang dan jasa dapat tercermin dari PDRB, yang mencakup perubahan dalam nilai kesejahteraan penduduk, sumber daya manusia, dan pendapatan riil dalam jangka panjang, dan tingkat pengangguran (Pramana, 2022).

Seluruh nilai tambah dari semua produk dan jasa yang dihasilkan di wilayah lokal suatu negara dikenal sebagai produk domestik bruto regional, atau PDB. Terlepas dari apakah variabel-variabel produksi yang dimaksud dipegang oleh penduduk atau tidak, nilai tersebut dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. BPS, 2022b. Nasution menyatakan dalam (Rahman

dan Chamelia, 2015) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan elemen yang mempengaruhi perkembangan PDB Indonesia, Pengeluaran pemerintah daerah, dan tenaga kerja. Berdasarkan defenisi dari PDRB maka dapat disimpulkan bahwa perubahan PDRB dipengaruhi oleh pendapatan dan pengeluaran Dari suatu daerah. Pendapatan daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Anggaran yaitu Dana Peruntukan Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta sumber-sumber pendapatan daerah lainnya, sedangkan belanja daerah disebut juga belanja daerah.

Belanja daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, serta belanja bagi hasil dengan pemerintah provinsi/kabupaten dan desa. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan jasa. (Halim, 2014). Belanja modal mengacu pada pengeluaran yang dikeluarkan untuk membangun aset tetap. Tujuannya adalah membangun aset tetap seperti sarana, prasarana, dan prasarana untuk memberikan pelayanan publik yang memadai, dengan harapan dapat meningkatkan tingkat output perekonomian. Masyarakat dapat dengan mudah menjalani kehidupan sehari-hari dan investor mungkin tertarik ke wilayah tersebut jika wilayah tersebut memiliki infrastruktur yang memadai, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat produktivitas. (Handayani, 2019).

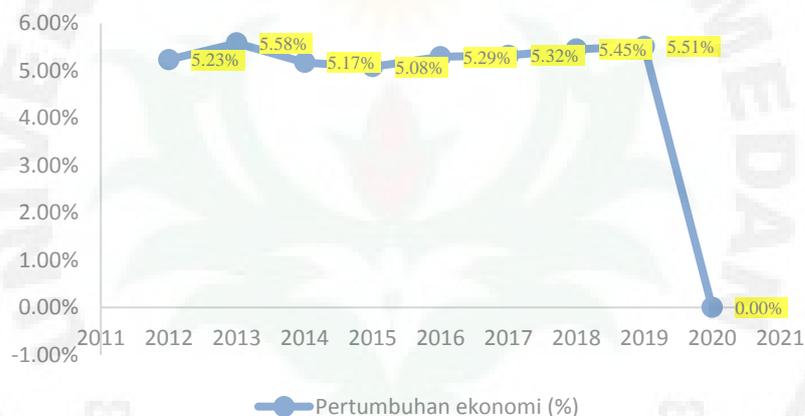
Pertumbuhan ekonomi dan belanja modal Hal ini mempunyai hubungan erat dengan perubahan sektoral dan struktural yang tinggi. Ekspansi ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni 1) sumber daya Alam (SDA), 2) Sumber Daya Manusia (SDM), 3) Akumulasi Modal, 4) Tenaga Manajerial dan Organisasi Produksi, 5) Teknologi dan 6) Faktor politik dan Administrasi Pemerintah. Sementara itu, Berdasarkan PDB suatu daerah, terlihat indikator-indikator yang dapat dijadikan standar pertumbuhan ekonomi. Produk domestik bruto suatu wilayah disebut output perekonomian regional atau PDRB. Kuantitas produk atau jasa yang dihasilkan suatu negara setiap tahunnya diukur dalam harga pasar dan dikenal sebagai produk domestik bruto, atau PDB. ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan PDB daerah, yang besarnya berbeda-beda di setiap wilayah. Ketimpangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU)(Putra, 2019).

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan tiga komponen utama dalam anggaran pemerintah daerah di Indonesia, dan keterkaitan mereka dengan Belanja Modal Daerah sangat erat. PAD, sebagai sumber pendapatan utama daerah tersebut, yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek besar. Sementara itu, DAU dan DAK juga menjadi sumber tambahan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung proyek-proyek investasi dalam Belanja Modal Daerah. Selain itu, hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK juga sangat kuat, terutama melalui pengaruhnya terhadap Belanja Modal awal Daerah.

Peningkatan ekonomi daerah seringkali didorong oleh investasi awal yang bertujuan untuk mengembangkan infrastruktur dan proyek-proyek investasi. (Mahmudi, 2010).

Pada kenyataannya, Peningkatan belanja modal, dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU), dan pendapatan asli daerah (PAD) belum tentu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada pemerintahan daerah saat ini. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa PAD, DAU, dan DAK secara tidak langsung akan mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu daerah. Permasalahan ini juga terjadi di daerah Kota Padangsidimpuan. Padangsidimpuan merupakan salah satu kota yang mengalami pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara. Awalnya kota Padangsidimpuan adalah ibu kota kabupaten tapanuli selatan yang kemudian menjadi kotamadya yang terpisah dari kabupaten tapanuli selatan. Padangsidimpuan merupakan salah satu kota yang berperan secara signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Sebagai kota yang berkembang, Padangsidimpuan memiliki kebutuhan akan investasi awal yang cukup besar untuk membangun infrastruktur dan fasilitas publik yang memadai. Namun, sumber pendanaan untuk belanja modal tidak hanya Selain uang alokasi umum dan khusus, pendapatan daerah juga berkontribusi terhadap hal tersebut diberikan oleh pemerintah pusat. Badan Pusat Statistik mencatat selama periode 2011-2020 alokasi DAU dan DAK mengalami trend yang naik turun. Sementara itu, dana PAD sendiri juga mengalami trend yang tidak tetap artinya juga naik turun setiap tahunnya. Hal ini tidak dapat dipungkiri memberikan pengaruh yang cukup besar

dengan trend pertumbuhan ekonomi kota padangsidempuan. Terlihat dari persentase pertumbuhan ekonomi kota padangsidempuan selama periode 2012 – 2020 hanya berkisar antara 5,17 persen sampai dengan 5,58 persen dan mengalami kemerosotan pada tahun 2020 dengan -0,73 persen. Pada Gambar 1.1 dapat dilihat selama periode 2012-2020, terlihat bahwa tahun dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah tahun 2013 sebesar 5,58 persen.



Gambar 1. 1 Grafik Pertumbuhan ekonomi Kota Padangsidempuan Tahun 2012 – 2020 (Sumber: BPS, 2022a)

Sementara jika dilihat alokasi DAU dan DAK pada tahun tersebut lebih kecil dari tahun-tahun sesudahnya serta PAD yang juga lebih kecil dari tahun-tahun sesudahnya. Dari segi belanja modal, tahun yang mengalokasikan belanja modal tertinggi selama periode 2012-2020 adalah tahun 2017 sebesar Rp.184.093.967 milyar dengan alokasi DAU dan DAK lebih besar dari tahun sebelumnya. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut hanya sebesar 5,32 persen lebih kecil dari tahun 2013 yaitu sebesar 5,58 persen dengan alokasi DAU dan DAK yang jauh lebih kecil. Data Tabel 1.1 di bawah ini merinci belanja

modal awal Kota Padangsidempuan, perluasan ekonomi, pendanaan daerah pribadi, pendanaan negara, dan pendanaan swasta:

Tabel 1. 1 Belanja modal, pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan DAK kota Padangsidempuan tahun 2012-2020

Tahun	Pertumbuhan ekonomi (%)	Belanja Modal (miliar Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rp)	Dana Alokasi Umum (miliar Rp)	Dana Alokasi Khusus (miliar Rp)
2012	5,23	98.758.765	23.682.308	364.923.284	23.986.606
2013	5,58	117.216.918	35.081.175	423.251.346	39.957.160
2014	5,17	104.032.328	58.752.450	470.353.368	38.329.260
2015	5,08	121.667.415	67.730.793	481,834,636	46.804.000
2016	5,29	159.508.881	78.417.755	507.686.451	138.084.975
2017	5,32	184.093.967	109.604.419	498.766.033	156.530.353
2018	5,45	113.072.061	75.063.575	498.221.822	124.683.309
2019	5,51	137.812.393	89.335.533	542.337.438	155.293.107
2020	-0,73	66.379.049,48	64.004.142,63	476.335.400	108.546.738,81

Sumber: (BPS, 2022c)

Berdasarkan gambar 1.1 dan tabel 1.1 dapat terlihat bahwa PAD, DAU dan DAK memberikan pengaruh pada modal belanja juga Pertumbuhan. Dapat terlihat pada tahun 2013 ketika dana PAD, DAU dan DAK naik dari tahun sebelumnya maka Belanja Modal dan pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 terjadi kenaikan pada DAU, dan kenaikan pada PAD sedangkan ada penurunan pada DAK dan terjadi penurunan pada Belanja Modal dan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan pada PAD, DAU dan DAK yang diiringi pada kenaikan belanja modal awal akan tetapi terjadi penurunan pada pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2016, terjadi kenaikan pada

PAD, DAU dan kenaikan yang sangat signifikan pada DAK yang diiringi dengan kenaikan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Pada Tahun 2017 terjadi kenaikan PAD dan DAK serta penurunan DAU dengan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi yang naik. Selanjutnya pada tahun 2018 terjadi penurunan PAD dan DAK serta DAU yang sama dengan tahun 2017 akan tetapi terjadi penurunan belanja modal bersamaan dengan ekspansi ekonomi yang lebih cepat. Pada tahun 2019 terjadi lonjakan penanaman modal dan pertumbuhan ekonomi seiring dengan peningkatan PAD, DAU, dan DAK. Sementara itu terjadi perubahan yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 sampai dengan -0,73% serta belanja modal yang juga menurun dengan kondisi PAD, DAU, DAK yang juga turun.

Uang yang diterima daerah menurut peraturan daerah yang taat kepada peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Bab Lima Nomor 1 tentang kedudukan keuangan pemerintah pusat dan daerah, disebut dengan pendapatan asli daerah, atau BANTALAN. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, PAD terdiri dari pendapatan asli daerah serta retribusi daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang khas. Pemungutan pajak daerah dipisahkan ke dalam beberapa kategori (misalnya, cukai, pajak air permukaan, pajak mobil, dan bea kepemilikan kendaraan di atas air) dan pendapatan pajak kabupaten/kota (seperti pajak restoran, hotel, parkir, hiburan, reklame, penerangan jalan, dan Pajak kategori C atas eksploitasi mineral. Biaya jasa umum, biaya jasa komersial, dan biaya perizinan khusus merupakan tiga kategori biaya daerah. Pendapatan, segmen, dan penjualan saham milik lokal

semuanya dimasukkan dalam hasil pengelolaan kekayaan regional yang berbeda. Pendapatan asli tambahan yang diperbolehkan di wilayah tersebut menurut negara mencakup penjualan aset, transaksi giro, dividen, keuntungan dari nilai tukar rupiah dibandingkan dengan nilai tukar Penerimaan dari penjualan dan perolehan produk dan jasa oleh pemerintah, termasuk komisi, pembayaran, dan devisa (Sabrina, 2019).

Sementara itu, Asal keuangan adalah DAU (Dana Alokasi Umum) perimbangan yang dialokasikan dari pusat ke daerah dengan besaran tertentu dan tidak tetap setiap tahunnya. Secara teori, DAU Dana ini berasal dari APBN dan didistribusikan untuk membantu pengeluaran dalam keseluruhan skema penerapan desentralisasi dengan mencapai keseimbangan keuangan antar bidang. Hal ini merupakan hasil dari perolehan kewenangan pemerintah daerah dari pemerintah federal. Untuk meningkatkan kesetaraan dalam memberikan pelayanan publik di seluruh Indonesia, DAU diberikan kepada seluruh kota dan daerah. Besarnya DAU yang dialokasikan tergantung pada luas wilayah dan jumlah penduduk di daerah tersebut. (Jambak, 2021).

Sedangkan menurut Halim dalam (Dewi, 2020) Dana yang berasal dari pendapatan APBN disalurkan ke daerah-daerah tertentu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dimaksudkan untuk membantu pembiayaan kegiatan-kegiatan khusus yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan selaras dengan tujuan nasional. Yani N. Dewi (2020) menyatakan bahwa DAK berupaya mendanai inisiatif swasta yang merupakan tujuan nasional dan daerah. Dengan kata lain, DAK diperuntukkan bagi daerah yang masih terdapat pendapatan asli

daerahnya daerah yang rendah dan perlu melakukan upaya pembenahan untuk membangun wilayahnya sendiri. Jika alokasi DAK dari pemerintah pusat cukup besar, hal tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut masih bergantung secara signifikan pada dukungan fiskal pusat dan belum mandiri secara fiskal..

Penelitian (Gunantara and Dwirandra, 2014) Melalui analisis Hasil, Pindabatan Asli Dyer (PAD), dan Dana Alukasi Omum (DAU), mereka membantu mencapai hasil yang menguntungkan dan memberi energi pada perekonomian, mencakup payaya bersyarat, yang menimbulkan dampak buruk dan pertumbuhan ekonomi yang substansial. Evaluasi moderasi mengungkapkan bahwa Biaya Modal memiliki dampak melemahkan pada pengaruh PAD terhadap Perkembangan Ekonomi. Sebaliknya, sebagai faktor moderasi, Belanja Modal tidak dapat mengubah efek DAU pada pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini mungkin akibat dari kurangnya optimalisasi distribusi pendapatan daerah untuk belanja modal, sehingga proyek yang dilakukan bersifat tidak efektif dan tidakmenguntungkn. Dalam penelitian lain oleh (Daluasih and Badrudin, 2021) Menyimpulkan bahwa PAD secara langsung Hal ini mempengaruhi belanja modal dengan cara yang menguntungkan, sedangkan belanja modal memiliki dampak buruk pada pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan temuan tersebut, hasil penelitian oleh (Febrianto and Muchtolifah, 2022) juga menyimpulkan bahwa PAD, DAU, dan DAK memiliki pengaruh baik debgan ekonomi.

Sumber pendapatan yang berasal dari pajak, retribusi, hasil ekonomi pemerintah, dan sumber lain yang berbeda dikenal sebagai pendapatan asli teritorial. Sementara itu, pemerintah pusat memberikan uang kepada daerah

melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Penyaluran Khusus (DAK) untuk membiayai berbagai program pembangunan yang telah ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan factor penting dalam pengembangan kota Padangsidimpuan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat memicu meningkatnya pendapatan asli daerah serta penerimaan DAU dan DAK. Hal ini dapat memperkuat posisi kota dalam mengembangkan belanja modal. Namun, terdapat perdebatan Tentang pengaruh DAK, DAU, dan pendapatan daerah terhadap belanja modal di Kota Padangsidimpuan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa belanja modal dipengaruhi secara positif oleh pendapatan dalam negeri, DAU, dan DAK sementara yang lain menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian untuk mengetahui secara rinci efek pada Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak belanja modal dan pendapatan asli daerah, DAU, dan DAK terhadap peningkatan perekonomian Kota Padangsidimpuan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pengelolaan keuangan daerah di kota Padangsidimpuan dan menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan program pembangunan kota yang lebih efektif dan efisien.

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah sebelumnya, beberapa masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2020 akan tetapi Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 mengalami

kenaikan sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi di Kota Padangsidimpuan.

2. Realisasi Dana Alokasi Umum mengalami penurunan pada tahun 2017, 2018 dan 2020 yang sedangkan pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan pada tahun 2017 dan 2018 dan penurunan pada tahun 2020.
3. Realisasi Dana Alokasi Khusus mengalami penurunan pada tahun 2014 dan 2020 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada tahun 2018, Dana Alokasi Khusus mengalami penurunan sedangkan pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan.
4. Pertumbuhan ekonomi kota Padangsidimpuan sejak tahun 2012 sampai dengan 2019 berada diantara 5,17 persen dan 5,58 persen dan mengalami penurunan yang sangat jauh pada tahun 2020 menjadi -0,73 persen dengan PAD, DAU dan DAK yang diikuti oleh penurunan PAD, DAU dan DAK.
5. Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahun dari tahun 2012 sampai tahun 2020 dengan jumlah PAD, DAU dan DAK yang tidak tetap serta pertumbuhan ekonomi yang juga tidak tetap.

1.3 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan analisis dasar yang telah diberikan sebelumnya, beberapa masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Kota Padangsidimpuan?
2. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Kota Padangsidimpuan?

3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Kota Padangsidempuan?
4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal Kota Padangsidempuan?
5. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan ekonomi melalui Belanja modal di Kota Padangsidempuan?
6. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal Kota Padangsidempuan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal
2. Untuk mengetahui pengaruh langsung Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal
3. Untuk mengetahui pengaruh langsung Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Belanja Modal
5. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Belanja Modal
6. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Belanja Modal

1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu banyak orang, di antaranya:

1. Untuk Lembaga pemerintah daerah

Studi ini diharapkan dapat memberi tahu pemerintah lokal tentang bagaimana meningkatkan sumber pendapatan lokal mempengaruhi pengalokasian dana modal, khususnya bagaimana PAD mempengaruhi kemandirian daerah.

2. Bagi Akademisi

Dalam upaya untuk mewujudkan daerah otonom sebagai tujuan utama dari gagasan desentralisasi, Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan perspektif dan menambah pengetahuan tentang pengalokasian dana awal dan hubungannya dengan pengawasan keuangan lokal.

3. Bagi Peneliti lain

Diharapkan hasil studi dapat dimanfaatkan oleh para peneliti. lain untuk membantu mengembangkan dan menyelidiki konsep yang berkaitan dengan subjek penelitian, baik yang diperbarui, menambah, atau menyempurnakan.